

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan perekonomian daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun prioritas pembangunan tahunan daerah. Namun demikian dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2020 sebagai hasil dari proses politik yang baru akan dilakukan pada akhir tahun 2015. Sehingga konsep pembangunan perekonomian daerah masih akan memperhatikan Dokumen RPJMD 2011-2015 serta mempertimbangkan kebijakan sektor ekonomi yang dituangkan dalam RPJP Kota Metro maupun prioritas pembangunan Kota Metro tahun 2016 serta isu-isu strategis sektor ekonomi yang berkembang hingga tahun 2015. Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kota Metro juga akan memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat pusat (RKP) dan provinsi (RKPD Provinsi Lampung).

Dalam tataran nasional, tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahun 2016 yang mengambil tema “**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas**”.

Kebijakan Pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2016 terkait dengan misi kedua RPJMN Provinsi Lampung 2015-2019 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 yang bertema : “**Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pertumbuhan**

Ekonomi Yang Berkualitas” melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
2. Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
7. Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;
8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

Dalam masa transisi maka sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Metro tahun 2016 mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 yang tercantum dalam misi ketiga yaitu “Terwujudnya Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi Daerah” dengan sasaran berupa :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar dengan pemanfaatan struktur demografi.
2. Terwujudnya Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa serta pusat pemasaran, pengumpulan dan distribusi hasil produksi.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi daerah yang ditopang oleh pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah yang kuat dan kompetitif.

4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan karakter wirausaha, kemandirian dan berdaya saing.
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan berupa :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi, penyediaan lapangan kerja, penguatan lembaga keuangan dan perkoperasian serta kebijakan ekonomi yang mendukung kreatifitas dan inovasi warga.
2. Perwujudan Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa diarahkan pada penguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan wilayah Kota Metro dengan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Pembangunan struktur perekonomian yang kokoh diarahkan kepada pengembangan industri penghasil pertanian, optimalisasi revitalisasi pasar tradisional, peningkatan produksi pertanian, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan pengembangan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan pada pembinaan dan pembentukan karakter yang berdaya saing, memiliki jiwa wirausaha dan kemandirian yang tinggi.
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah diarahkan dengan mengintegrasikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam arus utama pembangunan.

Secara spesifik tema pembangunan Kota Metro di tahun 2016 adalah ***“Pembangunan yang Berkualitas dan Merata untuk Kesejahteraan Masyarakat”***, yang dituangkan ke dalam 7 (prioritas) pembangunan daerah yaitu : Pemerataan Kualitas Infrastruktur Perkotaan; (2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat; (3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan; (4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi; (5) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (6) Penguatan Perekonomian Lokal yang Berdaya Saing; dan (7) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Sampai Dengan Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

A. *Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Perkapita*

Kemajuan ekonomi suatu daerah secara umum dapat dilihat dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Kondisi makro ekonomi di Kota Metro sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kinerja Makro Ekonomi Kota Metro 2010 – 2015

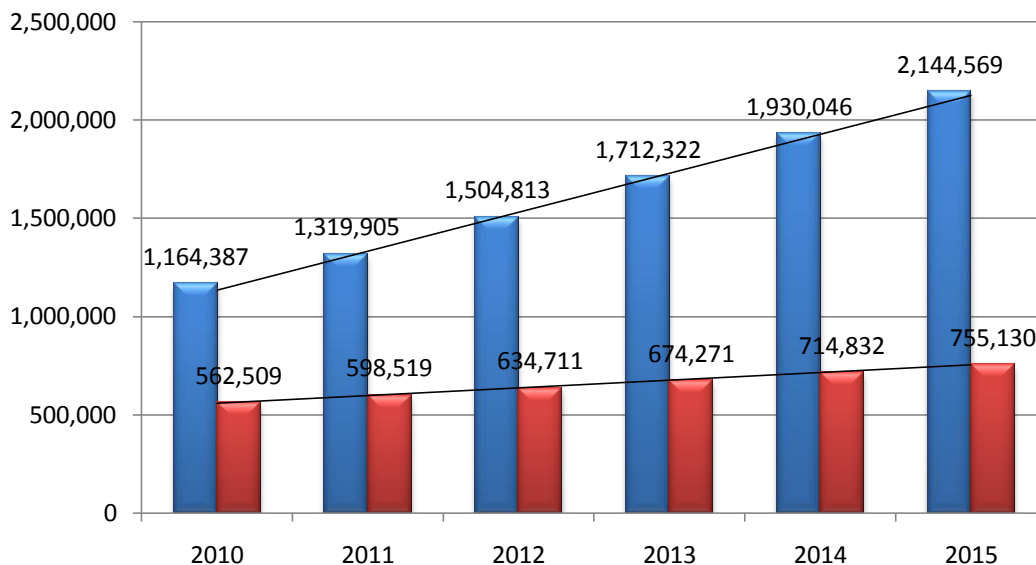
No	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
1	PDRB _{adhb} (Rp. Juta)	1.164.387	1.319.905	1.504.813	1.712.322	1.930.046	2.144.569
2	PDRB _{adhk} (Rp. Juta)	562.509	598.519	634.711	674.271	714.832	755.130
3	PDRB per kapita (Rp.)	8.004.255	8.975.895	10.075.006	11.153.955	12.304.258	13.475.566
4	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,89	5,21	6,05	6,23	6,02-7,95	5,64-7,31

Sumber : BPS Kota Metro, 2014

*) Angka Hasil Olah Data, 2015

Nilai PDRB Atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan rata-rata yang cukup signifikan yaitu dari 1.164.387 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 2.144.569 juta rupiah pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 980.182 juta rupiah (84,18%) selama 6 tahun atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 14%. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan dimana faktor inflasi sudah dihilangkan, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 – 2015 terjadi peningkatan sebesar 34,24% dari 562.509 juta rupiah menjadi 755.130 juta rupiah.

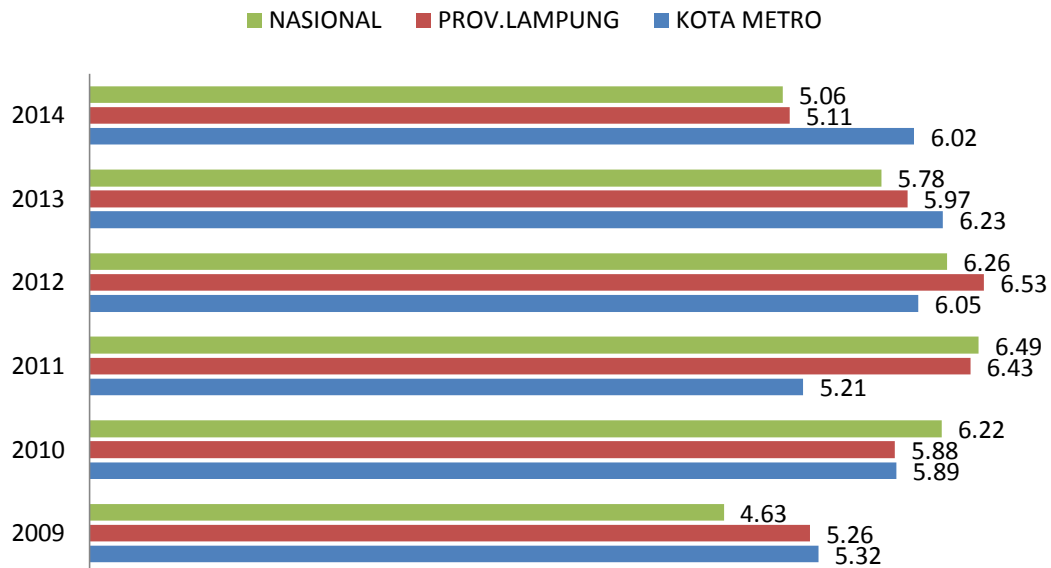
Gambar 3.1
PDRB ADHB dan ADHK Kota Metro
Tahun 2010 – 2015



Selain pengukuran dari sisi sektoral (*supply side*), PDRB juga dapat dilihat dari sisi penggunaan (*demand side*) maupun sisi pendapatan (*income side*). Disisi permintaan, PDRB Kota Metro pada periode 2009-2014, lebih dari 50 persen perekonomiannya ditopang oleh konsumsi rumah tangga, diikuti dengan PMTB pada kisaran 17-18 persen dan konsumsi belanja pemerintah pada kisaran 10-12 persen, dengan nilai nett ekspor sekitar 25 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2014 diperkirakan sebesar 6,02% (angka moderat) -- 7,95% (angka optimis). Angka pertumbuhan moderat ini melemah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,23% (angka BPS). Kondisi ini diperkirakan terjadi karena pengaruh kondisi perekonomian regional berupa berkurangnya nilai tambah di beberapa sektor sebagai akibat perubahan musim tanam sektor pertanian maupun kondisi perekonomian nasional yang cenderung lebih labil. Demikian juga halnya di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Metro diperkirakan hanya berada pada kisaran 5,64% (angka moderat) s.d. 7,31% (angka optimis) juga terlihat melemah dibandingkan angka pertumbuhan moderat maupun optimis di tahun 2014.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009 – 2014



Membandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Metro terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan nasional menunjukkan bahwa ekonomi Kota Metro berada pada kisaran pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Lampung.

Dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung pada Tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Metro sedikit berada di atasnya, selebihnya berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung hanya pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Metro berada di bawahnya.

Selain melihat PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita yang merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah merupakan salah satu alat ukur dari kinerja ekonomi makro daerah. Selama tahun 2010 – 2015 terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang cukup signifikan dari Rp. 8.004.255,- menjadi Rp. 13.475.566,- (68,36%) selama 6 tahun atau rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 11,40%. Upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara meningkatkan nilai tambah barang dan jasa di satu sisi dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk pada sisi yang lain. Namun pendapatan perkapita yang tinggi tidak akan banyak berarti jika diikuti oleh angka inflasi yang juga tinggi. Hal ini karena tingginya tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak mampu meningkatkan daya belinya.

B. Struktur Perekonomian

Melalui pengamatan terhadap kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB, pada kurun waktu tahun 2010–2015 sekitar 80% PDRB Kota Metro disumbangkan oleh sektor-sektor tersier yaitu sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Pada tahun 2013 dan 2014 serta 2015 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Metro adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 26,31%; 27,31%, dan 27,30% diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 23,32%; 23,36%, dan 23,30% serta kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,02%; 18,20%, dan 19,26%.

Secara riil dimana pengaruh perubahan harga sudah dihilangkan, selama periode 2000 - 2010 Sektor Jasa-jasa memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kota Metro sedangkan pada periode 2011-2015 peranan sektor jasa-jasa digantikan oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebagai sektor yang menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB. Sektor kedua terbesar adalah sektor pertanian yang berlangsung antara periode 2000–2001. Sedangkan sejak periode 2002 sampai dengan 2010, sektor pertanian

mengalami penurunan dan secara perlahan mulai tergeser oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 3.2
Struktur Perekonomian Kota Metro^{adhb}
Tahun 2010 - 2015 (Persen)

Lapangan Usaha						
	2010	2011	2012	2013	2014*)	2015*)
Pertanian	10,99	10,82	10,26	9,89	10,26	9,98
Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	3,00	2,83	2,77	2,78	4,56	4,46
Listrik, gas & air bersih	1,51	1,43	1,46	1,35	0,81	0,79
Bangunan	3,67	3,54	3,50	3,58	4,35	4,34
Perdagangan,hotel, dan restoran	13,59	13,32	13,67	13,91	18,51	19,26
Pengangkutan dan komunikasi	13,36	13,17	13,04	13,44	10,85	10,68
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	23,94	25,48	26,81	27,77	27,31	27,30
Jasa-jasa	29,94	22,01	28,43	27,22	23,36	23,20

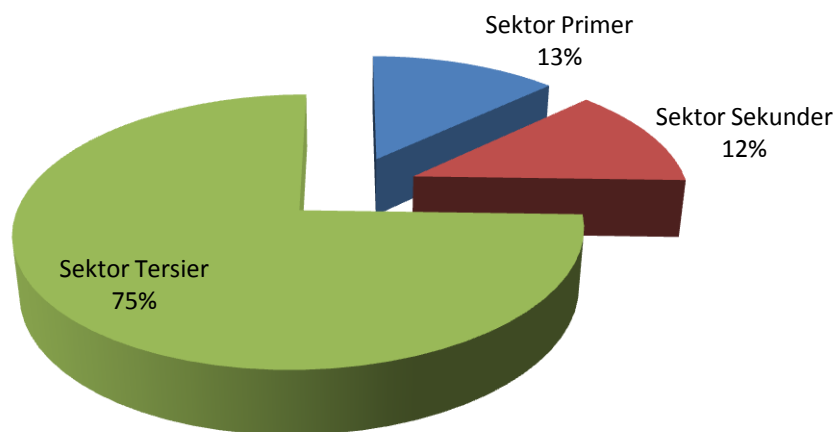
Sumber : BPS Kota Metro, 2014

Ket : *) Olah Data Bappeda, 2015

Menurut Todaro (1999) transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor primer (pertanian) dan beralih kepada peningkatan kontribusi sektor sekunder (industri) maupun kontribusi sektor tersier (jasa). Sehingga diharapkan dengan terjadinya pergeseran struktural perekonomian di Kota Metro yang ditandai dengan peralihan besaran kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB yang semula didominasi oleh sektor primer (tahun 2000) dan perlahan beralih kepada sektor jasa (2015) menunjukkan bahwa proses pembangunan yang berlangsung di Kota Metro dilakukan secara berkesinambungan serta sekaligus sebagai bentuk nyata dari bekerjanya

program penanggulangan kemiskinan sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.3
Struktur Ekonomi Kota Metro Tahun 2015

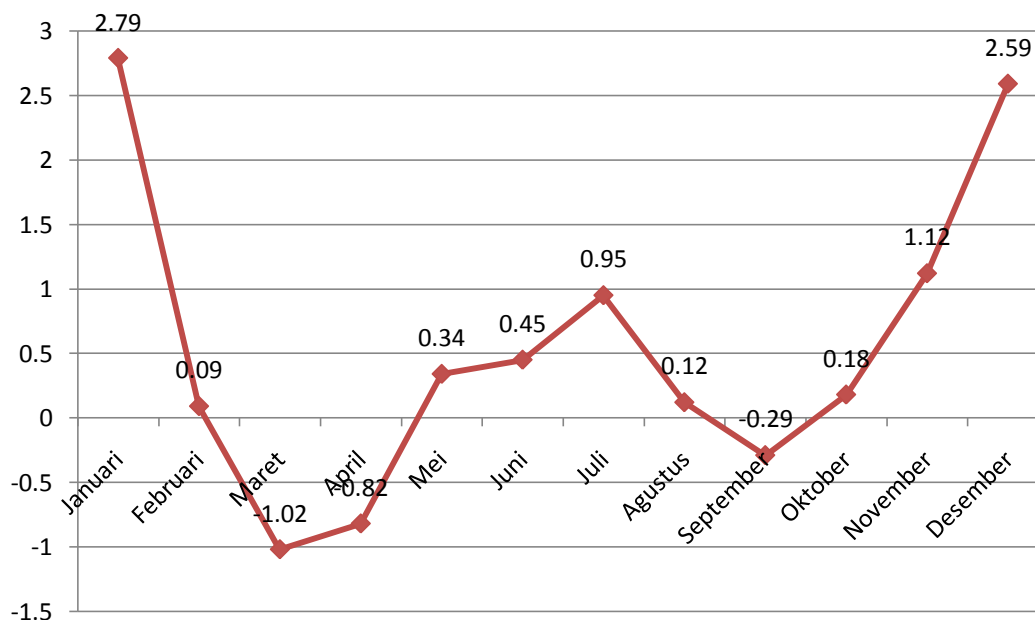


C. Inflasi

Angka Inflasi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang/jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga barang/jasa yang tinggi menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2014 sebesar 6,50% sebagai hasil perhitungan dari terjadinya kenaikan Indeks Harga Konsumen di Bulan Januari sampai dengan Desember di tahun yang sama dari tujuh kelompok pengeluaran.

Selama periode Januari hingga Desember 2014, inflasi terjadi selama 9 bulan sedangkan periode Maret, April dan September 2014 terjadi deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi di Bulan Januari 2014 sebesar 2,79%.

Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi
Bulan Januari s.d. Desember 2014



Perkembangan inflasi bulanan selama tahun 2015 juga mengalami fluktuasi. Pada Bulan Maret sampai dengan Mei terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,25%; 0,11% dan 0,82%. Sedangkan pada Bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,96%.

Komoditas yang memberikan andil deflasi cukup besar selama bulan Februari 2015 di antaranya adalah angkutan antar kota, bensin, cabe merah, angkutan dalam kota, kacang panjang, semen, cabai rawit, telur ayam ras, solar, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok pengeluaran yang menjadi pemicu terjadinya deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan sumbangan deflasi sebesar 0,8031 persen; kelompok bahan makanan dengan andil deflasi 0,0696 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang memberikan sumbangan deflasi 0,0839 persen; kelompok sandang dengan sumbangan deflasi 0,0061 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil deflasi 0,0011 persen. Sementara 2 (dua) kelompok pengeluaran menahan laju deflasi yakni kelompok makanan jadi,

minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok kesehatan dengan sumbangan inflasi masing-masing 0,0004 persen dan 0,0008 persen

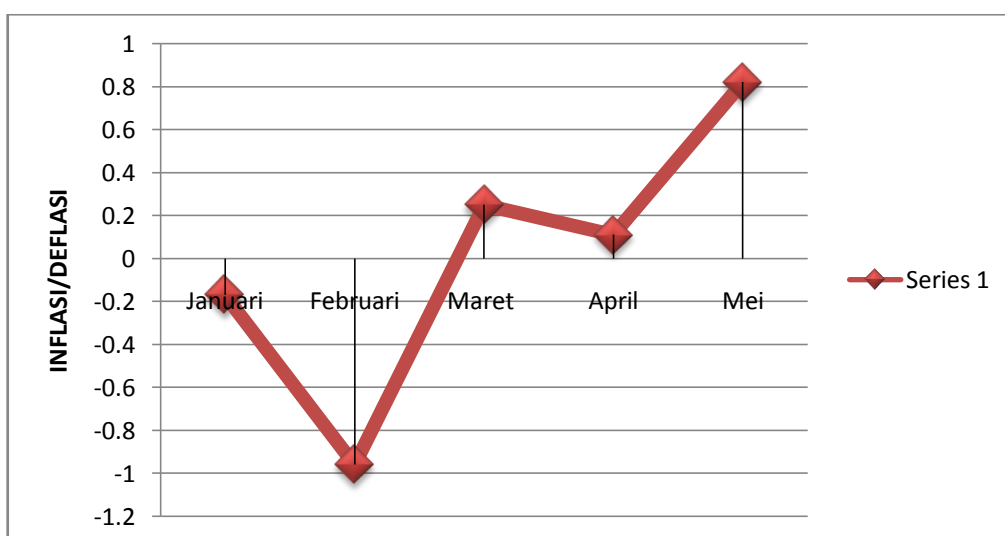
Komoditas yang memberikan andil inflasi cukup besar selama bulan Maret 2015 di antaranya adalah bawang merah, bensin, kembung/gembung, batu bata/batu tela, bawang putih, gula pasir, tomat sayur, rokok kretek filter, soto, dan bahan bakar rumahtangga. Kelompok pengeluaran yang memicu terjadinya inflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan sumbangan inflasi sebesar 0,1350 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan andil inflasi 0,1017 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang memberikan sumbangan inflasi 0,0312 persen; kelompok sandang dengan sumbangan inflasi 0,0149 persen; kelompok kesehatan dengan andil inflasi 0,0173 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil inflasi 0,0053 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi yakni kelompok bahan makanan dengan sumbangan deflasi sebesar 0,0577 persen. Perubahan indeks pada ketujuh kelompok pengeluaran tersebut menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Metro sebesar 0,25 persen.

Komoditas yang memberikan andil inflasi cukup besar selama bulan April 2015 di antaranya adalah bawang merah, bensin, bawang putih, gula pasir, solar, telur ayam ras, kembung/gembung, shampo, kacang panjang dan udang basah. Kelompok pengeluaran yang memicu terjadinya inflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan sumbangan inflasi sebesar 0,2447 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan andil inflasi 0,0405 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang memberikan sumbangan inflasi 0,0121 persen; kelompok sandang dengan sumbangan inflasi 0,0105 persen; kelompok kesehatan dengan andil inflasi 0,0380 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil inflasi 0,0030 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi yakni kelompok bahan makanan dengan sumbangan deflasi sebesar

0,2428 persen. Perubahan indeks pada ketujuh kelompok pengeluaran tersebut menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Metro sebesar 0,11 persen.

Komoditas yang memberikan andil inflasi cukup besar selama bulan Mei 2015 diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, jeruk, cabe rawit, sate, kacang panjang, dan gula pasir. Kelompok pengeluaran yang mendominasi terjadinya inflasi adalah kelompok bahan makanan dengan sumbangan inflasi sebesar 0,4311 persen dan dipicu oleh adanya kenaikan pada subkelompok bumbu-bumbuan; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan inflasi 0,1728 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan andil inflasi 0,1280 persen; kelompok sandang dengan sumbangan inflasi 0,0502 persen; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0166 persen; kelompok kesehatan dengan andil inflasi 0,0165 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil inflasi 0,0022 persen. Perubahan indeks pada ketujuh kelompok pengeluaran tersebut menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Metro sebesar 0,82 persen.

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi
Bulan Februari s.d. Mei 2015



Dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tingkat nasional maupun Provinsi Lampung menunjukkan tekanan inflasi terbesar di Kota Metro terjadi pada Tahun 2010 bahkan melampaui inflasi ditingkat nasional maupun provinsi sedangkan selebihnya berada diantara inflasi nasional dan provinsi bahkan pada tahun 2011 sampai 2013 berada di bawahnya.

Tabel 3.3
Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2010-2014

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KOTA METRO	3,07	10,89	2,36	2,87	7,40	6,50
LAMPUNG (%)	4,18	9,95	4,24	4,30	7,56	8,36
NASIONAL (%)	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36

D. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karenanya memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah daerah.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelaku utama investasi adalah kalangan dunia usaha. Dengan demikian untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah, penelitian ini mempertimbangkan persepsi dunia usaha dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu daerah. Persepsi ini juga perlu dipahami oleh Pemda. Sama halnya ketika ketika Pemda perlu mengetahui

bagaimana kerangka berfikir investor dalam menentukan pilihan lokasi untuk investasi.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Besaran ICOR juga digunakan untuk menunjukkan produktivitas dan efisiensi investasi yang dilakukan dan pada akhirnya berhubungan dengan besarnya pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.

Tabel 3.4
Nilai ICOR KM (%) Tahun 2009-2013

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
ICOR	3,02	2,63	2,36	2,96	2,87

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2009 – 2013 terdapat trend penurunan nilai ICOR yang menunjukkan bahwa kebutuhan investasi yang diperlukan Kota Metro untuk menambah output satu satuan tertentu semakin lama semakin kecil. Angka di atas juga menunjukkan bahwa pada awal pemekaran lebih banyak investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dibandingkan tahun-tahun selanjutnya, selain itu tingkat efisiensi dan produktivitas investasi juga semakin baik.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017

Sebagai bagian dari kesatuan perekonomian global dan nasional, maka tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Lampung akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Lampung.

3.1.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung

Perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Sejak Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter pada pertengahan tahun 2013, perekonomian global senantiasa berada dalam pusaran gejolak dan ketidakpastian. Pasar keuangan di sejumlah negara berkembang mengalami tekanan yang cukup berat sejalan dengan arus pembalikan modal asing (*capital reversal*) terutama ke AS yang mengakibatkan nilai tukar mata uang di sejumlah negara berkembang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Kondisi ini juga diperberat dengan kenyataan bahwa Tiongkok sedang memasuki fase perlambatan setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu tumbuh *double digit*. Sementara itu, Jepang yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan di kawasan Asia melalui kebijakan stimulus ekonomi yang cukup agresif juga masih belum menunjukkan prospek yang cukup kuat. Demikian pula yang terjadi di Eropa, prospek pemulihan dari krisis ekonomi masih belum berjalan sesuai harapan.

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut telah berdampak cukup nyata pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam tahun 2014, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih di atas 6 persen. Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I 2015 yang hanya tumbuh 4,7 persen lebih rendah dibandingkan kuartal I 2014 yang tumbuh 5,1 persen. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan

merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan (*current account*), yang terus mengalami defisit cukup besar.

Berdasarkan tema yang telah ditetapkan dalam RKP 2016, maka kebijakan fiskal 2016 diarahkan untuk “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Upaya tersebut dilaksanakan dengan (i) memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; (ii) memperkuat ketahanan fiskal; dan (iii) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Upaya memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Selanjutnya, upaya memperkuat daya tahan fiskal akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum, sedangkan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer.

Untuk mengamankan target penerimaan perpajakan, Pemerintah antara lain akan melakukan penggalan potensi penerimaan perpajakan dari sektor unggulan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, penegakan hukum dan penyempurnaan peraturan perundangan. Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target produksi usaha sumberdaya alam, melanjutkan renegotiasi perjanjian kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, serta melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP.

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara akan ditempuh antara lain dengan meningkatkan belanja infrastruktur, menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran melalui pemberian subsidi langsung kepada yang membutuhkan, mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kebijakan defisit yang akan ditempuh Pemerintah tahun 2016, masih akan bersifat ekspansif namun terukur dan terarah untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut diwujudkan dengan menempuh kebijakan defisit anggaran yang terkendali berkisar 1,7-2,1 persen terhadap PDB.

Kombinasi kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi Nasional

No.	URAIAN	TARGET KINERJA		
		2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan PDB (%)*)	5,8	6,6	7,1
2.	PDB per Kapita (ribu Rp) *)	47.804	52.686	58.489
3.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,0	4,0	4,0
4.	Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	12.200	12.150	12.100
5.	Tingkat Pengangguran (%)	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5

Sumber : RPJMN, 2015-2019

Berdasarkan kondisi ekonomi global dan perkembangan perekonomian terkini tersebut, yang tidak seoptimis perkiraan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,8-6,2 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen \pm 1,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.12.800 – 13.200 per dolar AS. Rata-rata Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan berkisar 4,0 persen hingga 6,0 persen. Selanjutnya, rata-rata harga minyak diperkirakan bergerak pada kisaran 60–80 dolar AS per barel. Sedangkan *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 1.930–2.050 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri dari *lifting* minyak bumi sekitar 830-850 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.100–1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Prospek perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2015, 2016 dan 2017 dipengaruhi oleh kinerja perekonomian nasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 masih terbuka lebar dengan asumsi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah dapat dikendalikan. Dengan memperhatikan berbagai kondisi dan situasi baik pada skala global dan nasional maka kondisi perekonomian Provinsi Lampung diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial
Provinsi Lampung

No.	URAIAN	TARGET KINERJA		
		2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung (%)	35,25	35,80	35,73
2.	PDRB per kapita (konstan)	7,090	7,106	7,106-7,500
3.	Pertumbuhan ekspor non migas (%)	6	6,25	6,30
4.	Nilai Tukar Petani (NTP)	124,53	125,64	125,65
5.	Pertumbuhan PAD (%)	2,64	8,84	10,28
6.	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi (%)	65	70	75
7.	Persentase Kemantapan Jalan Negara (%)	85,50	87,25	92,25
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,18	4,56	4,01
9.	Kemiskinan (%)	12,86	11,86	10,86

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung, 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,88% hingga 6,38%. Sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan berada pada kisaran 6,02% hingga 6,51%. Prospek pertumbuhan ekonomi di Tahun 2016 dan 2017 ini diperkirakan akan dapat dicapai dengan bertumpu pada 4 (empat) sektor utama yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian agar pertumbuhan ekonomi memiliki makna sebagai ukuran *welfare* maka tekanan inflasi tetap menjadi perhatian utama dan diusahakan berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Metro

Berdasarkan dinamika ekonomi global, nasional, dan provinsi Lampung, pada tahun 2016 dan 2017 secara makro akan memberikan peluang yang menjanjikan bagi perekonomian Kota Metro. Dengan asumsi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 diperkirakan berkisar antara 5,35 – 6,83 sedangkan pada tahun 2017 berkisar antara 5,81 – 7,31 persen, dan

inflasi sebesar 3,5 – 4,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 di atas dilandasi dengan beberapa asumsi sebagai berikut :

A. Sektor Pertanian

Nilai PDRB sektor pertanian adhk pada periode 2016-2017 secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 74.491 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 76.864 juta di tahun 2017. Namun *share* sektor ini terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan berada pada kisaran 9,36% (tahun 2016) menjadi 9,13% (tahun 2017) dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor pertanian juga cenderung melemah mulai dari angka 2,71% di tahun 2015 menjadi -1,12% di tahun 2016 lalu menguat lagi di tahun 2017 menjadi 3,18%.

Tabel 3.7
Perkembangan Sektor Pertanian_{adhk}
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Nilai Dalam PDRB (Juta)	75334	74491	76864
<i>Share</i> terhadap PDRB (%)	9,98	9,36	9,13
Laju Pertumbuhan Sektor (%)	2,71	-1,12	3,18

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Sektor pertanian dibentuk oleh 4 sub sektor, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta perikanan sedangkan sektor kehutanan tidak ada.

Sub sektor tanaman bahan makanan meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias. Peranan sub sektor tanaman bahan makanan dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang semakin *menurun*. *Share* sub sektor ini juga paling besar daripada sub sektor lainnya. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat yaitu usaha perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanam kurang dari 25 hektar; dan perkebunan besar yaitu tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau rakyat dengan luas areal tanam lebih besar atau sama dengan 25 hektar sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Sub sektor peternakan meliputi usaha pemeliharaan segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas baik bertujuan untuk dikembangkan, dipotong, maupun untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya. Peranan sub sektor peternakan dalam membentuk PDRB sektor pertanian berada pada urutan kedua setelah sub sektor tanaman bahan makanan. pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Sub sektor perikanan meliputi segala perusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik di sungai maupun perairan air tawar. Termasuk juga pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan rumah tangga. Peranan dan pertumbuhan sub sektor perikanan dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang fluktuatif.

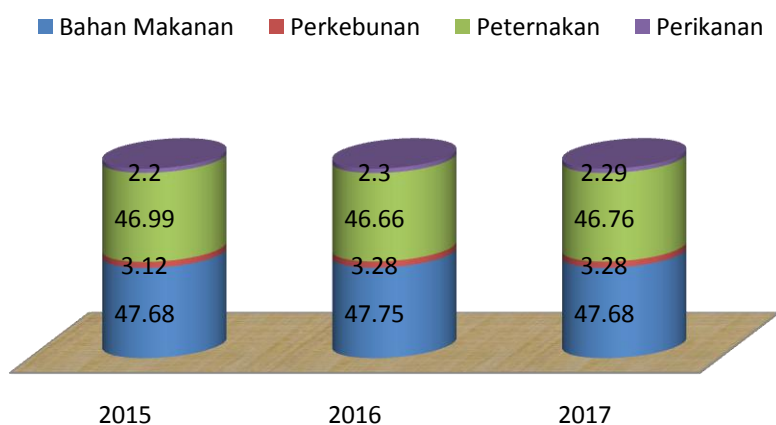
Tabel 3.8
Perkembangan Sub Sektor Pertanian
terhadap Sektor Pertanian
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<i>Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	35.922	35.571	36.645
Share terhadap Sektor Pertanian (%)	47,68	47,75	47,68
Laju Pertumbuhan (%)	2,73	-0,98	3,02
<i>Sub Sektor Tanaman Perkebunan</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	2.352	2.445	2.522
Share terhadap Sektor Pertanian (%)	3,12	3,28	3,28
Laju Pertumbuhan (%)	3,28	3,94	3,15

Sub Sektor Peternakan dan Hasilnya			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	35.401	34.760	35.940
Share terhadap Sektor Pertanian (%)	46,99	46,66	46,76
Laju Pertumbuhan (%)	2,66	-1,81	3,40
Sub Sektor Perikanan			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	1.658	1.715	1.756
Share terhadap Sektor Pertanian (%)	2,20	2,30	2,29
Laju Pertumbuhan (%)	2,86	3,41	2,42

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.6
Perkembangan Share Sub Sektor Pertanian
Terhadap PDRB Sektor Pertanian
Tahun 2015-2017



B. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi. Pembuatan dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun rumah tangga.

Nilai PDRB sektor industri pengolahan adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 33.682 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 35.821 juta di tahun 2017.

Share sektor ini terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan berada pada kisaran 4,46% di tahun 2015; 4,36% di tahun 2016 dan 4,26% di

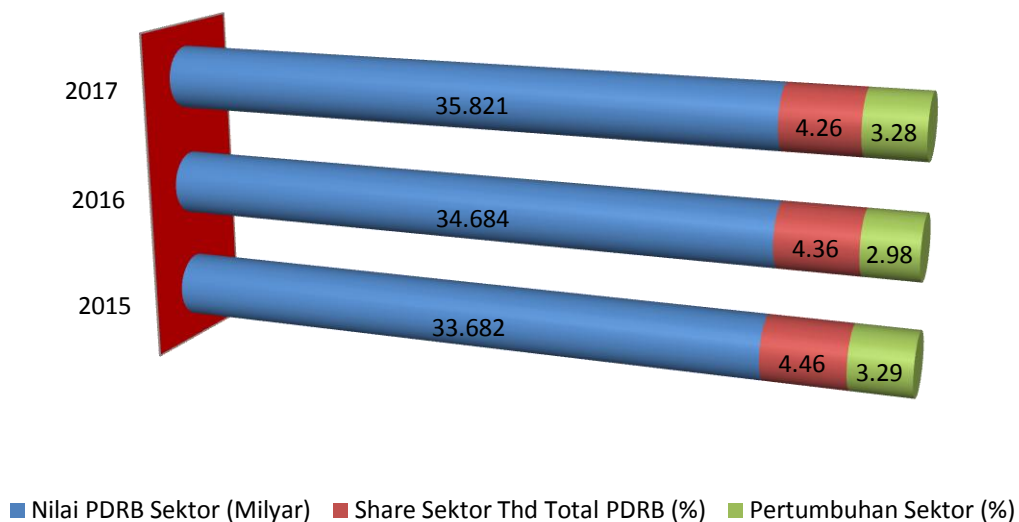
tahun 2017. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga selalu berubah-ubah mulai berkisar dari angka 3,28% di tahun 2017; 2,98% di tahun 2016 dan sebesar 3,29% di tahun 2015. Secara lengkap proyeksi sektor ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan^{adhk}
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Nilai Dalam PDRB (Juta)	33.682	34.684	35.821
Share terhadap PDRB (%)	4,46	4,36	4,26
Laju Pertumbuhan Sektor (%)	3,29	2,98	3,28

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.7
Perkembangan Nilai, Share dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2017



Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

C. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik, gas dan air bersih untuk Kota Metro hanya terdiri dari 2 sub sektor yaitu sub sektor listrik dan sub sektor air bersih sedangkan sub sektor gas belum tercatat karena sampai dengan saat ini produksi gas belum ada di Kota Metro.

Pengukuran nilai tambah dari sub sektor listrik meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada konsumen baik oleh PLN maupun non PLN, termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain seperti industri dan jasa-jasa yang dijual kepada pihak lain. Sedangkan sub sektor air bersih meliputi usaha penampungan dan penjernihan air bersih serta pendistribusiannya kepada konsumen yang dilakukan oleh PDAM Way Irang.

Nilai PDRB sektor listrik, gas dan air bersih adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 5.985 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 6.217 juta di tahun 2016 dan 6.449 juta di tahun 2017.

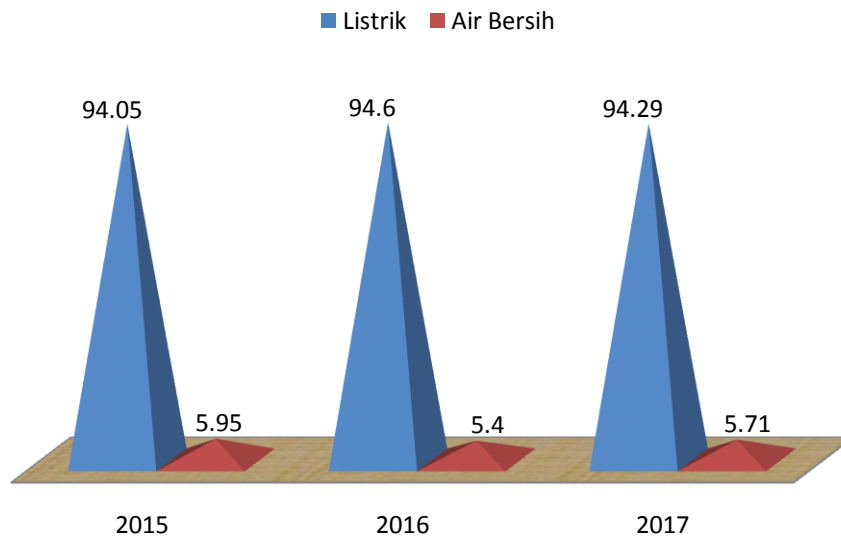
Share sektor ini terhadap pembentukan PDRB merupakan yang terkecil dibandingkan sektor lainnya, berada pada kisaran 0,79% (tahun 2015); 0,78% (tahun 2016) dan 0,77% (tahun 2017). Sedangkan pertumbuhan sektor ini juga selalu fluktuatif mulai dari angka 3,56% di tahun 2015 menjadi 3,88% di tahun berikutnya, lalu menjadi 3,73% di tahun 2017.

Tabel 3.10
Perkembangan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih_{adhk}
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Sub Sektor Listrik			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	5.629	5.881	6.081
Share terhadap Sektor (%)	94,05	94,60	94,29
Laju Pertumbuhan (%)	3,11	4,48	3,39
Sub Sektor Air Bersih			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	356	336	368
Share terhadap Sektor (%)	5,95	5,40	5,71
Laju Pertumbuhan (%)	11,25	-5,62	9,52

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.8
Perkembangan *Share* Sub Sektor
Terhadap PDRB Sektor
Tahun 2015-2017



Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

D. Sektor Bangunan

Perhitungan nilai tambah pada sektor ini meliputi usaha pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan,

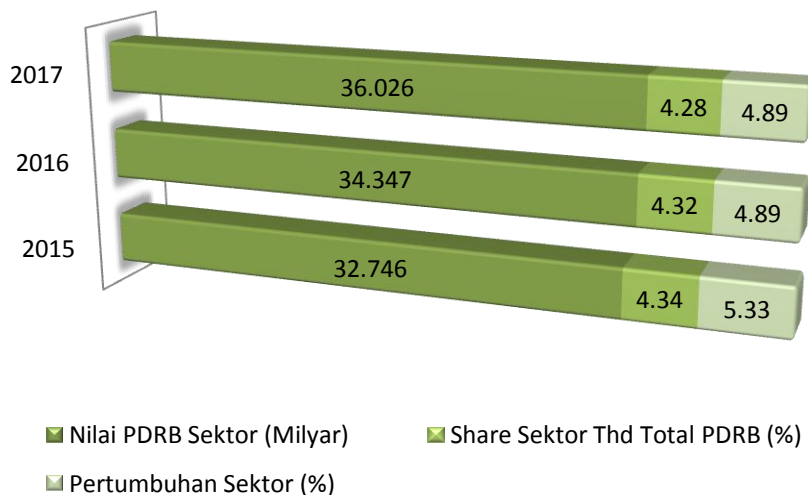
serta perombakan suatu bangunan atau konstruksi lainnya, meliputi bangunan tempat tinggal/bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya. *Share* sektor bangunan secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar antara 4,34% di tahun 2015; 4,32% di tahun 2016 dan 4,28% di tahun 2017. Pertumbuhan sektor ini dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan yang turun.

Tabel 3.11
Perkembangan Sektor Bangunan^{adhk}
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Nilai Dalam PDRB (Juta)	32.746	34.347	36.026
<i>Share</i> terhadap PDRB (%)	4,34	4,32	4,28
Laju Pertumbuhan Sektor (%)	5,33	4,89	4,89

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.9
Perkembangan Nilai, *Share* dan Pertumbuhan Sektor Bangunan Terhadap PDRB Tahun 2015-2017



Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

E. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Nilai PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 145.435 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 152.814 juta di tahun 2016 dan Rp. 163.890 juta di tahun 2017. *Share* sektor ini terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan berada pada kisaran 19,26% (tahun 2015); 19,21% (tahun 2016) dan 19,47% (tahun 2017).

Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga selalu berubah-ubah mulai dari angka 9,93% di tahun 2015 turun menjadi 5,07% di tahun berikutnya, menguat lagi di tahun 2017 menjadi 7,25%.

Sektor dibentuk oleh 3 sub sektor, yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel, dan sub sektor restoran. Perhitungan nilai tambah pada sub sektor perdagangan besar meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baik yang baru maupun bekas oleh pedagang dari pihak produsen atau importir kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau konsumen tanpa merubah bentuk dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah bentuk baik barang baru maupun barang bekas yang dilakukan secara eceran.

Peranan sub sektor perdagangan besar dan eceran dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang semakin *meningkat*. *Share* sub sektor ini juga paling besar daripada sub sektor lainnya. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini juga memiliki kecenderungan fluktuatif.

Perhitungan sub sektor hotel meliputi usaha penyediaan penginapan dan berbagai akomodasi lainnya seperti hotel, motel, losmen dan sejenisnya baik yang tersedia untuk umum ataupun hanya untuk anggota organisasi tertentu atas dasar pembayaran. Termasuk juga kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya yang berada dalam satu usaha dengan penginapan tersebut.

Nilai PDRB sub sektor ini terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat namun peranan sub sektor hotel dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan

yang *menurun*. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Perhitungan sub sektor restoran meliputi usaha restoran/rumah makan, katering, cafetaria dan kantin. Termasuk juga usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya dimakan langsung ditempat penjualan seperti warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya.

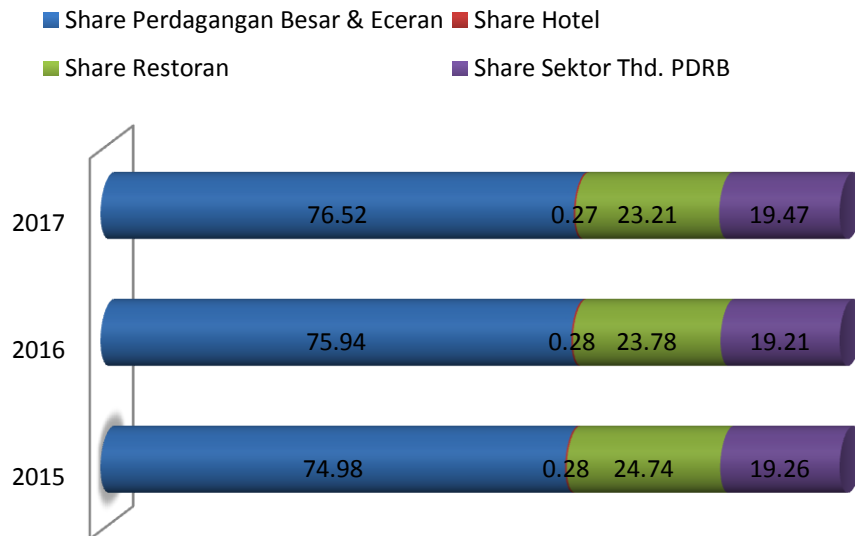
Nilai PDRB sub sektor ini terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat namun peranan sub sektor hotel dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang *menurun*. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.12
Perkembangan Sub Sektor
terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<i>Sub Sektor Perdagangan Besar & Eceran</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	109.040	116.049	125.406
Share terhadap Sektor (%)	74,98	75,94	76,52
Laju Pertumbuhan (%)	9,33	6,43	8,06
<i>Sub Sektor Hotel</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	414	429	443
Share terhadap Sektor (%)	0,28	0,28	0,27
Laju Pertumbuhan (%)	3,45	3,45	3,43
<i>Sub Sektor Restoran</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	35.980	36.337	38.041
Share terhadap Sektor (%)	24,74	23,78	23,21
Laju Pertumbuhan (%)	11,85	0,99	4,69

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.10
Perkembangan Sub Sektor Terhadap
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Tahun 2015-2017



F. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Nilai PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 80.618 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 84.036 dan Rp. 88.437 juta di tahun 2016 dan 2017. *Share* sektor ini terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan berada pada kisaran 10,68% (tahun 2015); 10,56% (tahun 2016) dan 10,51% (tahun 2017). Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi juga selalu berubah-ubah mulai dari angka 3,99%; 4,24% dan 5,24% masing-masing di tahun 2015 hingga 2017.

Sektor pengangkutan dan komunikasi terdiri dari 2 sub sektor yaitu sub sektor pengangkutan/transportasi dan sub sektor komunikasi. Perhitungan nilai tambah pada sub sektor pengangkutan/transportasi meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak atas dasar pembayaran, termasuk didalamnya adalah jasa angkutan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan beserta penyediaan fasilitasnya.

Perhitungan sub sektor komunikasi terdiri atas pos dan telekomunikasi serta jasa penunjang komunikasi lainnya. Pos dan telekomunikasi meliputi kegiatan pelayanan jasa komunikasi untuk umum yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan PT Telkom. Kegiatan PT Pos meliputi pengiriman surat, paket dan wesel. Sedangkan kegiatan PT Telkom meliputi pemberian jasa seperti pengiriman berita menggunakan telepon, teleks dan telegrap. Pada jasa penunjang komunikasi mencakup kegiatan perantara/penghubung antara produsen dan konsumen pemakai jasa pos dan komunikasi seperti wartel, warpostel dan jasa titipan.

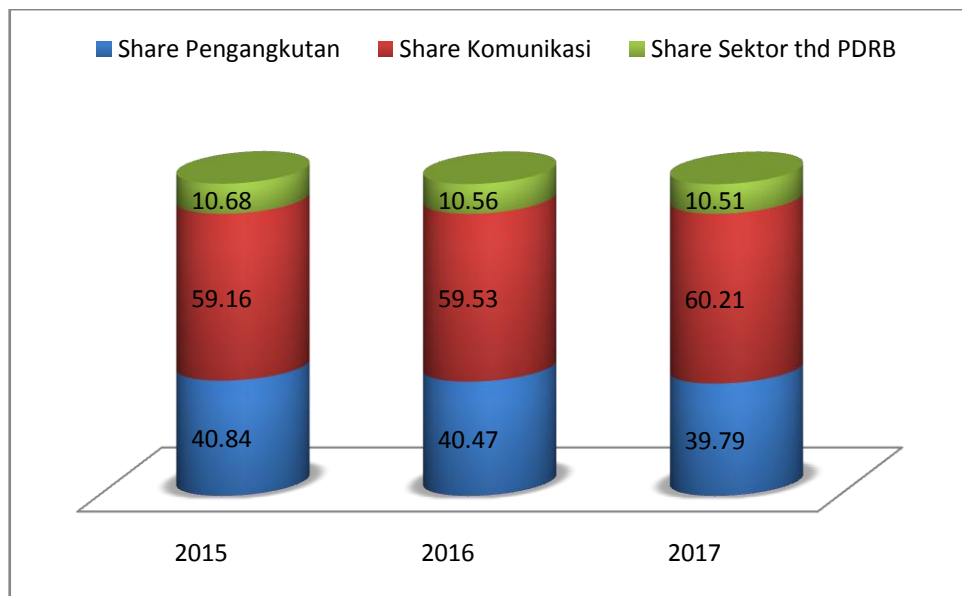
Nilai PDRB masing-masing sub sektor terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.13
Perkembangan Sub Sektor
terhadap Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<i>Sub Sektor Pengangkutan</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	32.925	34.012	35.191
Share terhadap Sektor (%)	40,84	40,07	39,79
Laju Pertumbuhan (%)	3,26	3,30	3,47
<i>Sub Sektor Komunikasi</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	47.693	50.024	53.246
Share terhadap Sektor (%)	59,16	59,53	60,21
Laju Pertumbuhan (%)	4,50	4,89	6,44

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.11
Perkembangan Sub Sektor Terhadap
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Tahun 2015-2017



G. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Nilai PDRB sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 206.153 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 222.797 juta dan Rp. 243.814 juta di tahun 2016 dan 2017. *Share* sektor ini terhadap pembentukan PDRB mencapai 27,30%; 28,01%; dan 28,97% masing-masing di tahun 2015 sampai 2017. Pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan juga selalu berubah-ubah masing-masing 5,60%; 8,07%; dan 9,43% di tahun 2015 hingga 2017.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terdiri dari 4 sub sektor yaitu sub sektor bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Perhitungan nilai tambah pada sub sektor bank meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak lain, memberi pinjaman, transfer/memindahkan rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan lain-lain.

Perhitungan sub sektor lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi simpan pinjam, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

Sub sektor sewa bangunan meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah tangga. Sedangkan sub sektor jasa perusahaan meliputi kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan tabulasi, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

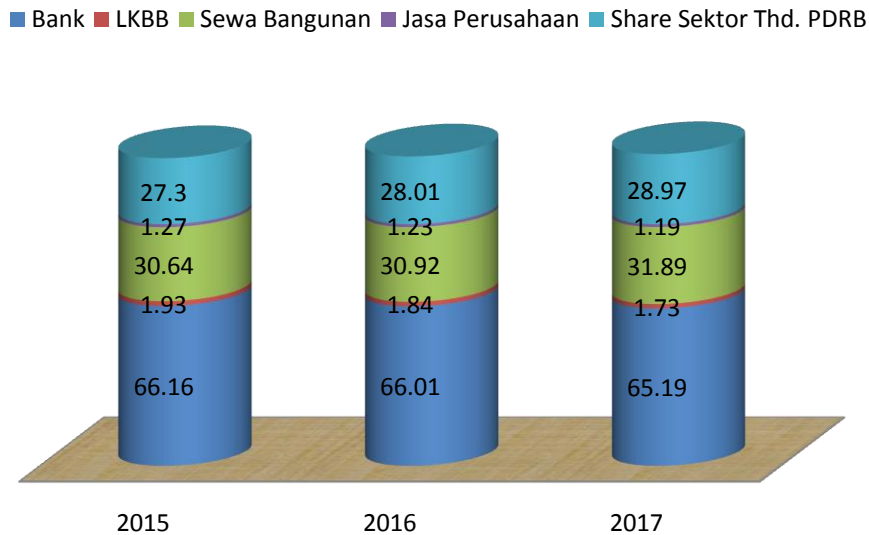
Nilai PDRB sub sektor terhadap Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun peranan sub sektor ini dari waktu ke waktu fluktuatif.

Tabel 3.14
Perkembangan Sub Sektor Terhadap
Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<i>Sub Sektor Bank</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	136.397	147.070	158.947
Share terhadap Sektor (%)	66,16	66,01	65,19
Laju Pertumbuhan (%)	4,80	7,82	8,08
<i>Sub Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	3.979	4.092	4.217
Share terhadap Sektor (%)	1,93	1,84	1,73
Laju Pertumbuhan (%)	2,79	2,84	3,05
<i>Sub Sektor Sewa Bangunan</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	63.158	68.893	77.741
Share terhadap Sektor (%)	30,64	30,92	31,89
Laju Pertumbuhan (%)	7,56	9,06	12,84
<i>Sub Sektor Jasa Perusahaan</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	2.619	2.743	2.910
Share terhadap Sektor (%)	1,27	1,23	1,19
Laju Pertumbuhan (%)	5,54	4,74	6,09

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.12
Perkembangan *Share* Sub Sektor
Terhadap PDRB Sektor Sektor Keuangan,
Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Tahun 2015-2017



H. Sektor Jasa-Jasa

Nilai PDRB sektor Jasa-Jasa adhk pada periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Rp. 175.177 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 186.142 juta di tahun 2016 dan Rp. 190.429 juta di tahun 2017. *Share* sektor ini terhadap pembentukan PDRB 23,20%; 23,40% dan 22,62% di tahun 2015 hingga 2017. Pertumbuhan sektor jasa-jasa juga selalu berubah-ubah mulai dari angka 4,92% di tahun 2015; 6,268% di tahun berikutnya, dan 2,30% di tahun 2017.

Sektor jasa-jasa terdiri dari 2 sub sektor, yaitu sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor swasta. Perhitungan nilai tambah pada sub sektor pemerintahan umum mencakup kegiatan pemerintah dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi seperti mengatur daerah. Nilai PDRB sub sektor ini terhadap Sektor jasa-jasa secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, peranan sub sektor ini dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang *menurun*. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada sub sektor swasta perhitungan meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta perorangan dan rumah tangga. Sosial kemasyarakatan meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa sosial dan kemasyarakatan yang diusahakan oleh swasta seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya. Hiburan dan rekreasi meliputi usaha penyediaan dan pengelolaan berbagai jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat yang berorientasi untuk mencari keuntungan.

Perorangan dan rumah tangga meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumah tangga seperti reparasi, binatu, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumah tangga dan jasa perorangan lainnya.

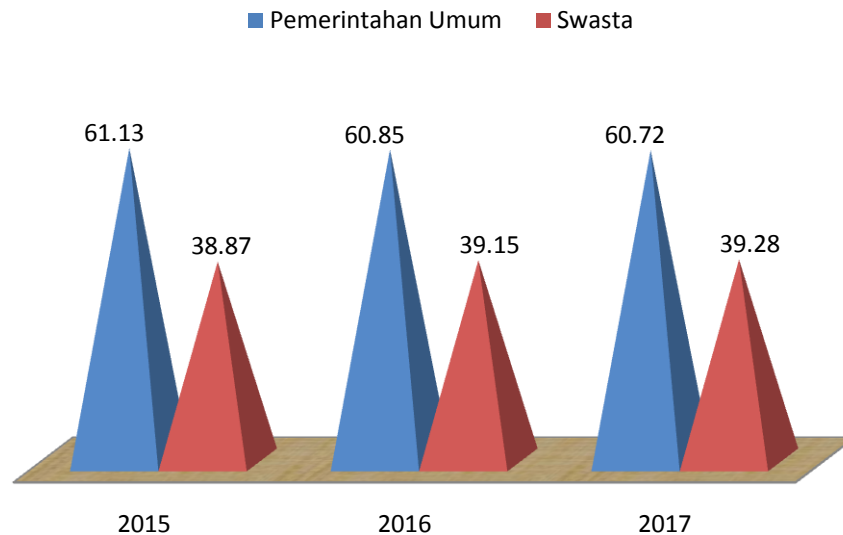
Nilai PDRB sub sektor swasta terhadap Sektor jasa-jasa secara kuantitatif memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, demikian juga halnya dengan peranan sub sektor ini dari waktu ke waktu memiliki kecenderungan yang juga *meningkat*. Sedangkan pertumbuhan sub sektor ini berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.15
Perkembangan Sub Sektor
Tahun 2015-2017

URAIAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
<i>Sub Sektor Pemerintahan Umum</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	107.087	113.263	115.632
Share terhadap Sektor (%)	61,13	60,85	60,72
Laju Pertumbuhan (%)	2,24	5,77	2,09
<i>Sub Sektor Swasta</i>			
Nilai Dalam PDRB (Juta)	68.091	72.879	74.798
Share terhadap Sektor (%)	38,87	39,15	39,28
Laju Pertumbuhan (%)	9,44	7,03	2,63

Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Gambar 3.13
Perkembangan *Share* Sub Sektor
Terhadap PDRB Sektor
Tahun 2015-2017



Sumber : Olah Data Bappeda, 2015

Prospek pertumbuhan ekonomi Kota Metro selama di tahun 2016 hingga tahun 2017 akan selalu dipengaruhi oleh kinerja perekonomian nasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Kinerja perekonomian nasional diantaranya dipengaruhi oleh seberapa cepat Pemerintah mampu memanfaatkan peluang yang ada yaitu kecepatan untuk merespon dengan baik kondisi ekonomi global pada tahun 2015 yang akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian nasional.

Perkembangan lingkungan eksternal Kota Metro sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi perekonomian Kota Metro pada tahun 2016, sesuai dengan kondisi yang terjadi di tingkat dunia, nasional, dan provinsi, diperkirakan adalah :

1. Nilai tukar rupiah yang tidak stabil sebagai imbas dari berbagai tekanan eksternal yang terjadi di dunia global;

2. Kondisi makro ekonomi daerah akan terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi nasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat;
3. Semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upaya menarik investasi, yang disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibatnya tidak meratanya penyebaran investasi.
4. Semakin beratnya beban Pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas, seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya;
5. Terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan substitusi energi.

Sedangkan faktor internal yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Kota Metro tahun 2016 adalah :

1. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor.
2. Iklim investasi yang kondusif, seperti rendahnya angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi akan sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan aktifitas ekonomi.
3. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh kuat didorong oleh berbagai faktor positif, terutama berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi Pemerintah Daerah juga diperkirakan terus tumbuh yang berasal dari komponen belanja pegawai untuk perbaikan kesejahteraan aparatur Negara dan pensiunan.

Tantangan-tantangan tersebut diatas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan

rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi sinergitas dari semua *stakeholders* pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi diatas, maka arah kebijakan yang diambil dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
2. Revitalisasi dan optimalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Dukungan bagi kelancaran sistem logistik dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat (ketahanan pangan);
4. Penguatan ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Pengembangan pertanian organik yang didukung oleh SDM dan sistem pemasaran yang memadai, disertai sosialisasi;
6. Inventarisasi produk unggulan daerah yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi;
7. Intensifikasi pertanian terpadu yang sesuai untuk diterapkan guna peningkatan pendapatan petani;
8. Revitalisasi pasar tradisional untuk mengembangkan skala kegiatan perdagangan barang dan jasa di Kota Metro;
9. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang bertujuan untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Metro;
10. Menciptakan ketentraman dan ketertiban agar stabilitas ekonomi terjaga dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
11. Menyederhanakan prosedur perizinan usaha;
12. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui jaringan sistem keuangan mikro;
13. Efisiensi alokasi sumberdaya dan dana dalam perekonomian daerah;

14. Meningkatkan implementasi dari langkah-langkah perbaikan iklim investasi sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Meningkatkan kompetensi, daya saing, dan perlindungan tenaga kerja;
16. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian rakyat;
17. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang didukung oleh partisipasi masyarakat;
18. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian;
19. Meningkatkan kemitraan perdagangan;
20. Mengembangkan kepariwisataan yang berpotensi local;
21. Memantapkan dan melanjutkan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan pada masing-masing SKPD Kota Metro;
22. Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan yang diambil pada tahun 2016, beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah Kota Metro pada Tahun Anggaran 2016 diantaranya adalah :

1. Menciptakan manajemen pemerintah yang pro bisnis

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan

pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut :

✓ **Menyediakan Informasi kepada Pengusaha**

Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan.

✓ **Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan**

Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Perhatian utama calon penanam modal oleh sebab itu adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran

pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan.

Pengusaha juga mengharapkan kepastian kebijakan antar waktu. Kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan mengenai keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di daerahnya. Kerjasama yang saling menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap mitra usaha. Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara terencana dan merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah.

✓ **Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan**

Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di Kota Metro adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih

tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah daerah perlu berupaya agar konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil.

✓ **Menyederhanakan prosedur perizinan usaha**

Proses perizinan acap kali menjadi kendala bagi para pengusaha. Patologi mengenai pelayanan publik yang berbelit-belit, tidak transparan serta jangka waktu pemerosesan yang tidak jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Metro. Pada tahun 2015, pemerintah lebih memfokuskan pada penyederhanaan SOP perizinan khususnya perizinan bagi pengusaha.

2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban agar stabilitas ekonomi terjaga dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

Salah satu syarat mutlak untuk menarik investor berpartisipasi dalam pembangunan Kota Metro adalah dengan menciptakan stabilitas keamanan lokal Kota Metro. Situasi ketentraman dan ketertiban yang stabil memberikan jaminan keamanan bagi investasi yang sedang dan atau akan berlangsung. Dengan meningkatnya nilai investasi akan berdampak pada perekonomian masyarakat lokal, baik dalam hal produksi maupun konsumsi. Sampai saat ini, kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Metro relatif stabil. Konflik SARA yang minimal mampu dijaga oleh pemerintah daerah, aparat keamanan dari instansi vertikal maupun masyarakat Kota Metro sendiri. Kondisi ini akan ditingkatkan pada tahun 2015 mengingat perubahan pola berpikir masyarakat yang makin kritis.

3. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;

Peningkatan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada infrastruktur yang tersedia. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang baik mampu memberikan multiplier effect terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Kelancaran distribusi hasil produksi serta pengaksesan sektor jasa akan menciptakan nilai tambah bagi hasil produksi. Hasilnya,

pengembangan ekonomi kreatif yang pada akhirnya akan memberikan lapangan kerja baru bagi penduduk serta menciptakan sustainable development. Saat ini kondisi infrastruktur transportasi, niaga dan public space relatif telah terpenuhi. Namun, pada tahun 2016 pembangunan infrastruktur akan lebih diarahkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang baru dan meningkatkan akses daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.

4. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui jaringan sistem keuangan mikro;

Seperti telah diketahui bahwa jumlah pelaku ekonomi kecil lebih banyak daripada pelaku ekonomi besar. Begitu pula halnya dengan jumlah masyarakat dengan pendapatan rendah lebih banyak daripada masyarakat dengan pendapatan tinggi. Upaya pemerataan ekonomi melalui pembinaan-pembinaan usaha mikro dan pemberian kredit ringan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, baik di sektor pertanian maupun perdagangan, industri hulu maupun industri hilir. Namun hal terpenting yang selama ini terabaikan adalah tidak terintegrasinya sistem pembinaan ataupun pemberdayaan terhadap usaha mikro, dalam hal ini adalah pemerintah, pelaku dunia usaha, dan pihak jasa keuangan. Pada tahun 2016, pemberdayaan industri mikro dan masyarakat miskin melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan lebih ditingkatkan agar tujuan yang ingin dicapai dapat tepat sasaran.

5. Efisiensi alokasi sumberdaya dan dana dalam perekonomian daerah;

Inefisiensi alokasi sumberdaya dan dana dalam perekonomian daerah disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik. Perencanaan strategis yang selama ini dilakukan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Perencanaan yang dilakukan masih banyak yang terpaku pada hal-hal teknis tanpa memperhatikan hasil yang akan dicapai. Pada tahun 2016, diharapkan para pemangku kepentingan dapat merencanakan dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang lebih efisien demi kepentingan masyarakat yang berbasis *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.

6. Meningkatkan implementasi dari langkah-langkah perbaikan iklim investasi sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Meskipun secara administratif luas wilayah Kota Metro relatif kecil dengan kondisi kekayaan alam yang kurang mumpuni, namun Kota Metro memiliki status sebagai kota penyangga bagi Kota Bandar Lampung. Artinya bahwa, pembangunan Kota Bandar Lampung yang meluap akan ditampung oleh Kota Metro. Selain itu, sektor jasa yang terus berkembang, menjadi faktor lain yang memberikan harapan bagi investasi di Kota Metro. Pembangunan yang terarah diharapkan mampu menciptakan sebuah konsep kota yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengimplementasikan upaya-upaya perbaikan iklim investasi melalui kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil, proses administrasi pelayanan yang tidak berbelit-belit, memperlakukan masyarakat sebagai customer dengan cara memberikan kepuasan layanan, mencari alternatif sumber pendanaan bagi usaha mikro, dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Metro mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Berkaitan dengan itu, maka penyusunan APBD Kota Metro memperhatikan prinsip : partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat azas. Arah kebijakan keuangan daerah menjabarkan arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
 - f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi :
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Perkembangan realisasi pendapatan selama kurun waktu tahun 2013–2014, target 2015, serta proyeksi pendapatan tahun 2016 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.16
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2013 s.d Tahun 2016

NO	Uraian	Realisasi		Target 2015	Proyeksi 2016
		2013	2014		
	PENDAPATAN	618.314.052.296,90	705.769.933.206,42	726.252.733.214	721.830.197.346
1.	Pendapatan Asli Daerah	73.038.244.838,51	97.421.477.067,36	96.774.394.747	105.835.700.554
	Pajak Daerah	11.291.481.099,78	12.651.879.441,00	12.735.500.000	13.322.000.000
	Retribusi Daerah	4.980.519.054,00	5.375.635.672,00	5.480.884.000	5.160.891.200
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.884.797.831,09	3.389.937.354,26	3.184.797.831	3.184.797.831
	Lain Lain PAD Yang Sah	53.881.446.853,64	76.004.024.600,10	75.373.212.916	84.168.011.523
2.	Bagian Dana Perimbangan	451.227.114.937,00	487.715.129.640,00	507.245.910.467	494.739.927.307
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	23.276.285.137,00	18.206.944.797,00	43.588.710.467	31.050.537.307
	Bagi Hasil Bukan Pajak	17.072.882.800,00	20.805.783.843,00		
	Dana Alokasi Umum	374.201.187.000,00	414.624.161.000,00	422.921.330.000	422.921.330.000,00
	Dana Alokasi Khusus	36.676.760.000,00	34.078.240.000,00	40.765.870.000	40.768.060.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	94.044.392.521,39	120.633.326.499,06	122.232.428.000	121.254.569.485
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dr Provinsi & Pemda Lainnya	23.420.367.315,11	36.285.142.850,00	39.130.000.000	37.986.941.485
	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	69.290.881.000,00	77.989.976.000,00	83.102.428.000	83.267.628.000
	Pendapatan Lainnya	1.333.144.206,28	6.358.207.649,06	--	--

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana

perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.17
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja
Tahun 2013 s.d Tahun 2016

Uraian	Realisasi		Target 2015	Proyeksi 2016
	2013	2014		
Belanja	609.265.220.466,90	694.000.976.646,00	779.762.360.301	776.410.945.354,60
Belanja Tidak Langsung	326.819.012.131,90	354.465.812.180,00	358.360.660.275	394.650.958.996,60
Belanja Pegawai	309.198.254.851,90	335.838.413.136,00	354.779.137.275	391.419.625.996,60
Belanja Hibah	17.009.026.500,00	18.504.985.720,00	736.190.000	886.000.000,00
Belanja Bantuan sosial	70.000.000,00	5.000.000,00	201.050.000,00	201.050.000,00
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	473.064.416,00	1.117.413.324,00	1.144.283.000	1.144.283.000,00
Belanja tidak terduga	68.666.364,00	7.540.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Langsung	282.446.208.335,00	338.527.624.466,00	421.401.700.026	381.759.986.358,00
Belanja Pegawai	35.527.540.814,00	26.195.426.323,00	36.247.006.332	
Belanja Barang dan jasa	142.473.794.581,00	184.596.585.597,00	217.197.174.024	
Belanja Modal	104.444.872.940,00	127.735.612.546,00	167.957.519.670	

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Metro pada tahun 2016 adalah Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Lampung.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.18
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan
Tahun 2013 s.d Tahun 2016

No.	Uraian	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Proyeksi 2016
	PEMBIAYAAN	62.483.985.028,60	70.446.991.192,60	53.509.627.087,00	54.580.748.008,60
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	64.431.855.697,60	71.546.991.192,60	58.349.627.087,00	56.080.748.008,60
	SILPA	64.361.826.809,60	71.532.816.858,60	58.349.627.087,00	56.080.748.008,60
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	70.028.888,00	14.174.334,00	--	--
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.947.870.669,00	1.100.000.000,00	4.840.000.000,00	1.500.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) PT. Bank Lampung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	947.870.669,00	100.000.000,00	3.340.000.000,00	--